



TERHALANG - Warga melintasi trotoar berquiding block untuk penyandang tuna netra yang desainnya membentur Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Jalan Menteri Supeno, Yogyakarta, Rabu (5/9).

## Akses Trotoar Kota Belum Ramah Disabilitas

**YOGYA, TRIBUN** - Sejumlah trotoar di Kota Yogyakarta, belum ramah terhadap difabel. Contohnya, sepanjang jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta, yang lokasinya berdekatan Nol Kilometer, baik sisi kanan maupun sisi kiri jalan.

Hal tersebut disebabkan masih jaranginya *guiding block* serta beberapa ruas jalan yang digunakan sebagai tempat parkir maupun jualan pedagang kaki lima. Mansyur Samad (19), mahasiswa yang tengah melakukan magang di Yogyakarta mengungkapkan, jangankan untuk difabel, bagi dirinya saja kesulitan

mencari jalan yang ramah bagi pejalan kaki. Mansyur menyebutkan, di sepanjang jalan yang dia lalui masih banyak ditemukan parkir dan orang jualan makanan. Paling tidak, diatur parkirnya. Saya setiap hari jalan kaki selama magang di sini juga merasa agak kesulitan. Apalagi, bagi teman-teman difabel, dimana juga jarang ada *guiding block*nya. Mereka juga pasti kesulitan, "terangnya, saat ditemui *Tribun Jogja* tengah berjalan di sepanjang jalan Ahmad Dahlan.

• ke halaman 13

## Akses Trotoar Kota Belum

• Sambungan Hal 13

Mansyur mengatakan, seharusnya pemerintah memperhatikan akses bagi para difabel, terutama difabel netra yang perlu petunjuk ketika sedang melintas. Tak hanya di jalan Ahmad Dahlan, hal serupa juga terjadi di sepanjang jalan Brigjen Katamso.

Renny Anggriana Frahesty, anggota Perempuan Peduli Pelayan Publik Kota Yogyakarta menyatakan, *guiding block* sangat diperlukan bagi difabel, terutama tuna netra.

"Trotoar memiliki fungsi sama, baik bagi difabel maupun bukan. Persoalannya saat ini, masih banyak ditemukan *guiding block* yang tak memenuhi aturan," ucapnya.

Renny mengingatkan, ada kriteria khusus terkait *guiding block*, misalnya warna, material, hingga bentuknya.

### Datangi DPRD Kota

Sementara perwakilan masyarakat penyandang disabilitas mendatangi Gedung DPRD Kota Yogyakarta, kemarin. Mereka meminta kejelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas yang sejak 2015 hingga kini belum disahkan.

Direktur Cikal Kota Yogyakarta, Nuning Suryatining-sih menjelaskan, pihaknya telah menunggu waktu lama agar hak-hak mereka dapat diakui layaknya hak warga lainnya. "Ada banyak akses fisik yang akan dibangun harus berdasarkan pada Perda tersebut. Perda ini jadi pegangan kami. Pemkot harus menjalankan pembangunan sesuai amanah Perda," bebarnya, Rabu (5/9).

Ia menyatakan, beberapa perwakilan penyandang disabilitas sudah mengusulkan draf Raperda Disabilitas sejak 2015. Proses pembahasan pun sudah dilakukan mulai naskah akademik hingga berbagai diskusi dan seminar tentang perencanaan penyusunan Raperda Disabilitas.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki Hari Saksana menjelaskan, bahwa pembahasan mengenai Raperda Penyandang Disabilitas sempat terhenti, karena harus menyesuaikan Undang-Undang yang baru disahkan pada 2016 silam.

"Dulu ada UU baru pada saat raperda dibahas sehingga perlu banyak penyesuaian. Itu yang membuat jadi panjang. Saat ini draftnya masih di pansus," ujarnya.

Basuki menyatakan, sebenarnya pembangunan gedung di Kota Yogyakarta

sudah banyak yang mengindahkan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. "Sudah teratur, tapi tersebar. Nanti dengan perda ini dikompilasi jadi satu hak-haknya apa saja," ujarnya.

Ketua Pansus Raperda Penyandang Disabilitas, M Fauzan mengungkapkan, pembentukan Raperda Pansus tak bisa dilakukan secara gegabah. Fauzan mengatakan, Raperda sudah dibahas sejak awal 2018 harus melalui Komite Disabilitas terlebih dahulu, mengingat kebutuhan disabilitas yang harus melalui pertimbangan-pertimbangan khusus.

"Yang tahu kan teman-teman komite. Jadi, dalam penyusunan awalnya draf dari mereka, jika sudah selesai dibawa ke kita. Kemudian kita bahas lagi," terangnya.

Saat ini, akunya, pembahasan Raperda ini sudah mencapai 50%. Sampai saat ini, sedang dalam penyusunan draf.

Fauzan menyebutkan jika sebelumnya Raperda mengenai Penyandang Disabilitas tersebut sudah dibawa ke Pemerintah Provinsi DIY, namun ditolak. Oleh karenanya, Pansus mulai menyusun lagi draf Raperda yang baru. (may/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005